

OPTIMALISASI RUANG BERBASIS KEBIJAKAN BERKELANJUTAN DI HUTAN MANGROVE KABUPATEN WAKATOBI

Supriadi Takwim^{1*}, Sitti Rabiatal Wahdaniyah Herman², Muhammad Yogi Raditya³

¹⁾ Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako

²⁾ Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

³⁾ Dosen Institut Teknologi Kalimantan

**Corresponding Author, Email: supriaditakwim1301@gmail.com*

Info Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima: 10 April 2023 Disetujui: 31 Mei 2023	Selain terkenal dengan panorama bawah laut yang langsung dirasakan masyarakat, Wakatobi juga memiliki persebaran mangrove yang cukup luas, terutama di Pulau Kaledupa dan di banyak tempat lainnya. Keberadaan potensi mangrove yang sangat besar ini harus ditelaah lebih lanjut, terutama dalam hal penataan ruang, yang mencakup kebijakan berkelanjutan, yang diharapkan berdampak positif terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Hamparan vegetasi mangrove di Kabupaten Wakatobi harus dilihat sebagai potensi yang selain dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan alam bawah laut juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan nilai tambah bagi pemerintah daerah. Konservasi mangrove juga harus mampu memberikan timbal balik finansial sehingga konsep berkelanjutan dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan berkelanjutan. Optimalisasi ruang melalui kebijakan berkelanjutan hutan mangrove di Kabupaten Wakatobi diperlukan untuk memaksimalkan perannya sebagai penyangga lingkungan pesisir dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kata kunci : Optimalisasi Ruang, Hutan Mangrove, Kebijakan Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Wakatobi adalah singkatan dari nama empat pulau utama di wilayah Wakatobi: Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Wakatobi merupakan kepulauan seluas 1.390.000 hektar, terdiri dari 39 pulau, 3 (tiga) gusung dan 5 (lima) atol. Kepulauan Wakatobi adalah bagian dari wilayah administratif Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2003, Kabupaten Wakatobi menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003. Sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Wakatobi menjadi pusat ekonomi yang menarik wisatawan dan pekerja. Wakatobi telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh destinasi wisata tanah air oleh Kementerian Pariwisata. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di pesisir Wakatobi dan pesatnya kegiatan pembangunan untuk berbagai kegunaan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, dan pariwisata) akan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya pesisir dan laut. Sebagai taman nasional laut, pengembangan kawasan pesisir menuntut agar perairan Kabupaten Wakatobi diselaraskan dengan rencana zonasi yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan agar sumber daya pesisir dan laut memberi dampak positif.

Perairan Kabupaten Wakatobi memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang merupakan potensi sumber daya hayati seperti ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun dan ekosistem terumbu karang. Selain terkenal dengan panorama bawah laut yang berdampak langsung bagi masyarakat setempat, Wakatobi memiliki sebaran hutan mangrove yang cukup

luas, terutama di Pulau Kaledupa dan beberapa lokasi lainnya. Keberadaan potensi mangrove yang sangat besar ini perlu digali lebih jauh, terutama dalam hal rencana pengelolaan lingkungan yang diharapkan berdampak positif terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga kebijakan berkelanjutan harus dipertimbangkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun penelitian dengan judul Optimalisasi Ruang Berbasis Kebijakan Berkelanjutan Di Hutan Mangrove Kabupaten Wakatobi.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan berbasis perencanaan, meliputi: pendekatan terpadu (integratif); akses ke kebijakan berkelanjutan; pendekatan inklusif; dan pendekatan keruangan (spasial).

1. Metode Analisis

- a. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan bahagian dari metode analisis kuantitatif dengan menjabarkan analisis secara deskriptif kualitatif sehingga lahir suatu konsep dan sebagai dasar dalam analisis selanjutnya.
- b. Metode Evaluatif, digunakan untuk menilai sejauhmana implementasi arahan rencana tata ruang kawasan perkotaan wilayah kecamatan dengan kondisi saat sekarang ini.
- c. Metode Ekstrapolatif, diterapkan dalam hal keterbatasan data-data demografi dan biofisik lingkungan yang tersedia saat ini (*existing condition*) namun tetap mengikuti pola kecenderungan data-data tersebut.
- d. Hubungan Fungsional Antar Kegiatan, digunakan untuk menciptakan mekanisme ruang yang baik serta meningkatkan dayaguna dan hasil guna pemanfaatan ruang secara optimal.

2. Muatan Analisis

Proses analisis dalam pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan konsep pemanfaatan ruang baik dalam hal fisik, sosial, ekonomi maupun demografinya.

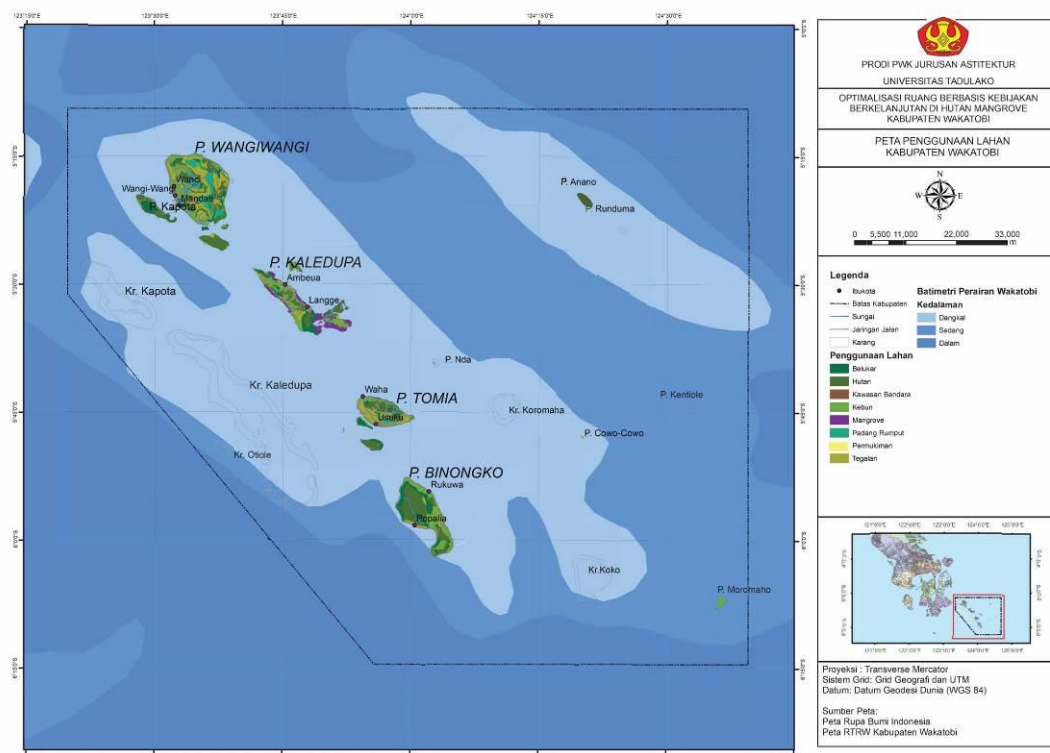
- a. Analisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi terkait dengan pengembangan kawasan mangrove.
- b. Analisis potensi dan permasalahan kawasan meliputi; aspek fisik, sosial ekonomi dan budaya serta aspek legal dalam upaya pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya lingkungan mangrove.
- c. Analisis kondisi oceanografi kawasan.
- d. Analisis isu strategis permasalahan dan kebutuhan terkait dengan rencana kerja pembangunan lingkungan hidup kawasan konservasi mangrove.
- e. Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan langkah Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan mangrove, serta pandangan masyarakat sekitar tentang pentingnya memelihara kawasan mangrove untuk melestarikan lingkungan, apakah masyarakat memahami atau tidak fungsi-fungsi zona mangrove di kawasan pesisir.
- f. Analisis daya tarik utama kawasan.
- g. Analisis sanitasi dan utilitas lingkungan, seperti; instalasi air bersih, instalasi tinja, sistem persampahan, saluran air buangan, dan Jaringan listrik.
- h. Analisis kebutuhan obyek pendukung.

- i. Analisis penentuan sarana dan prasarana penunjang.
- j. Analisis *Element* dan *Layout Site*.
- k. Analisis untuk menentukan skenario, rumusan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup kawasan mangrove yang selaras dengan gerak dan langkah pembangunan Kabupaten Wakatobi.

3. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan meliputi: Analisis GIS, Analisa Kapasitas Lahan Peruntukan, Analisa Daya Dukung Pengembangan Kawasan, Analisa Amplop Ruang, dan Analisis Tata Massa Bangunan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Wakatobi

Sumber: Interpretasi Citra, 2023

Penggunaan lahan di Wakatobi beragam. Lahan pertanian di Kabupaten Wakatobi adalah pertanian lahan kering, meliputi ladang, kebun, hutan rakyat dan perkebunan kecil. Huma biasanya digunakan untuk persawahan yang hanya terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa dan Kaledupa Selatan. Lahan kering biasanya digunakan untuk budidaya tanaman, hortikultura dan penanaman buah-buahan di seluruh kecamatan. Perkebunan rakyat digunakan untuk menanam berbagai hasil pertanian seperti kelapa, kakao, jambu mete, dan kopi. Perkebunan warga tersebar di seluruh kecamatan, dengan wilayah terluas di Kaledupa dan Kaledupa Selatan. Selain itu, terdapat 5.864 ha lahan pertanian yang ditanami tanaman hutan (hutan rakyat), dan lahan non pertanian terdiri dari padang rumput dan lahan yang sementara tidak digarap. Wangi-Wangi memiliki persentase lahan non-pertanian tertinggi per kecamatan,

sedangkan Tomia memiliki persentase terendah. Lahan non pertanian untuk sementara tidak digarap dan lahan lainnya relatif banyak di semua kecamatan.

Morfologi tapak (bentuk permukaan) adalah pengaruh proses alam dan struktur geologi terhadap material batuan dalam ruang dan waktu kronologis tertentu. Bentuk lahan Kabupaten Wakatobi terdiri dari dataran, lembah, perbukitan dan pegunungan. Morfologi pesisir merupakan hasil interaksi proses dinamis berdasarkan aspek geologi (meliputi topografi, ketahanan litologi, hidrologi, aktivitas vulkanik, proses tektonik dan sedimentasi); geofisika, meliputi cuaca (hujan, angin, arus, gelombang dan pasang surut); dan faktor manusia, termasuk pengumpulan material baik di lepas pantai, di darat maupun di darat, bangunan pantai dan kegiatan konstruksi di darat. Efek gabungan dari beberapa faktor yang disebutkan di atas menciptakan karakteristik pantai yang berbeda-beda. Kawasan mangrove Kabupaten Wakatobi terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Wakatobi meliputi: Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo-Binongko. Kawasan hutan mangrove Kabupaten Wakatobi meliputi area seluas 1.914,87 hektar.

Potensi ekonomi Kabupaten Wakatobi bersumber dari beberapa sektor, seperti sektor kelautan dan perikanan, sektor pertanian dan peternakan, sektor industri, komersial, koperasi dan UMKM. Di dalam sektor industri dan komersial terdapat sektor pariwisata yang merupakan salah satu potensi ekonomi utama Kabupaten Wakatobi. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas merupakan kebutuhan fisik dasar untuk mengatur sistem struktural yang diperlukan untuk mengamankan ekonomi sektor publik dan swasta sebagai layanan dan fasilitas untuk berfungsinya perekonomian. Prasarana dan sarana dapat berupa prasarana dan sarana daerah, serta sarana fisik dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Analisis Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Sesuai dengan arahan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wakatobi hingga tahun 2025, misi pengembangan mangrove Kabupaten Wakatobi adalah untuk mendorong pelestarian dan pemulihan keanekaragaman hayati fisik dan hayati setempat. RPJMD diharapkan dapat menjadikan keadaan biodiversitas fisiko-biologis di Kabupaten Wakatobi lebih lestari, berperan ganda sebagai aset pembangunan dan sebagai penopang sistem penghidupan ekonomi meningkat. Karena sebagian besar wilayah Kabupaten Wakatobi merupakan kepulauan pesisir, kaya akan sumber daya hayati yang beragam dengan ciri-ciri pesisir yang harus dilindungi. Ada dua jenis wisata yang ditawarkan di kawasan wisata alam wilayah Kabupaten Wakatobi yaitu wisata laut/pantai dan wisata gunung/pedesaan. Potensi wisata pantai dan pemandangan laut Kabupaten Wakatobi yang diprioritaskan untuk dikembangkan antara lain kawasan wisata Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Kegiatan ekowisata terpadu berkembang di Pulau Tomia.

Taman Nasional Wakatobi dikelola dengan sistem zonasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) No. SK. 149/iv-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007 menyatakan bahwa terdiri dari: Zona inti seluas 1.300 hektar. Luas pemanfaatan laut adalah 36.450 hektar. Kawasan wisata seluas 6.180 hektar. Pemanfaatan setempat seluas 804,00 hektar. Area penggunaan umum adalah 495.700 hektar dan zona khusus tanah seluas 46.370 hektar. Ruang publik direncanakan berada di kawasan *outdoor*, sedangkan fasilitas komersial direncanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi kawasan masing-masing titik di zona wisata yang terletak di sepanjang pantai. Dipengaruhi oleh upaya wisata alam, dimungkinkan untuk mengembangkan fasilitas wisata yang terbatas. Area

pembangunan dermaga dan lainnya harus memperhatikan sempadan pantai. Taman Nasional Wakatobi juga telah menetapkan zona lahan khusus di sekitar lima lokasi Model Desa Lindung (MDK). Pengembangan MDK dimaksudkan sebagai tujuan wisata alternatif untuk WTN dan pengembangannya perlu diperkuat.

Analisis Tutupan dan Sebaran Hutan Mangrove

Vegetasi mangrove terdapat di seluruh pulau Kabupaten Wakatobi. Vegetasi mangrove terbesar terdapat di Pulau Kaledupa dan dapat ditemukan hampir di semua desa (Laulua, Lange, Sombano, Buranga, Balasuna, Horuo dan Tampara). Di sisi lain, vegetasi mangrove paling banyak terdapat di Pulau Wangi Wangi. Desa Taipa dan Desa Makoro. Berdasarkan data spesies mangrove ditemukan 13 marga dan 28 spesies mangrove yaitu Rhizophoraceae (8 spesies), Avicenniaceae (4 spesies), Sonneratiaceae (2 spesies), Meliaceae (2 spesies), Rubiaceae (2 spesies), Malvaceae (2 spesies), Leguminosae (2 spesies), Apocynaceae (1 spesies), Combretaceae (1 spesies), Guttiferae (1 spesies), Lecythidaceae (1 spesies), Melastomataceae (1 spesies), Pandanaceae (1 spesies). Berdasarkan 28 jenis mangrove, terdapat 20 jenis mangrove sejati dan 8 jenis mangrove sekunder.

Kepadatan famili Rhizophoraceae paling tinggi, mencapai 30 individu/m² pada lapisan pertumbuhan semai. Kerapatan vegetasi mangrove mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir di semua area dan hampir di semua lapisan. Pulau Wangi-wangi memiliki kerapatan vegetasi tertinggi pada marga Rhizophoraceae pada kategori pancang dan semai, diikuti oleh Pulau Kaledupa pada kategori semai. Pada saat yang sama, kerapatan vegetasi bakau berkayu adalah yang terendah dari semua lokasi. Kekayaan spesies mangrove menunjukkan persebaran spesies dalam suatu kawasan. Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa sebaran spesies mangrove dalam komunitas relatif stabil selama empat tahun terakhir, dengan spesies yang paling melimpah adalah Rhizophoraceae. Frekuensi kategori pohon tertinggi ditemukan di Pulau Kaledupa. Sedangkan untuk kategori pancang dan semai paling banyak terdapat di pulau Kaledupa dan Wangi-Wangi. Berdasarkan data, genus Sonneratiaceae dan Rhizophoraceae merupakan mangrove dengan kontrol spasial terbaik. Penguasaan tertinggi masing-masing spesies pada kategori pohon terjadi di Pulau Wangi Wangi. Indeks kepentingan merupakan penjumlahan dari tiga variabel sebelumnya untuk setiap spesies, dan berdasarkan data tersebut, Rhizophoraceae memiliki peran terbesar dalam komunitas mangrove Wakatobi. Di antara semua variabel, Rhizophoraceae di Pulau Kaledupa memiliki indeks kepentingan tertinggi, dengan kategori pohon, pancang, dan semai yang cukup berimbang.

Analisis Penunjang Sektor Unggulan

a. Analisis Fasilitas Penunjang

Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam “Buku Panduan Wisata” yang diterbitkan, ketersediaan akomodasi di setiap tempat adalah sebagai berikut: terdapat 16 tempat akomodasi. Ketersediaan rumah makan merupakan isu penting dalam pariwisata. Menurut Rencana Pembangunan Pariwisata Pemerintah, jumlah dan persebaran rumah makan/restoran di Kabupaten Wakatobi masih cukup terbatas. Layanan restoran belum tersedia di semua pulau utama. Turis yang mengunjungi Kaledupa dan Binongko kesulitan menemukan restoran. Jumlah dan distribusi peluang dan pertukaran keuangan masih terbatas. Kehadiran transaksi keuangan, bank, ATM, kantor tukar untuk masyarakat umum dan wisatawan. Fasilitas keuangan dan penukaran mata uang hanya tersedia di Pulau Wangi Wangi, namun belum tersedia di tiga pulau utama lainnya. Wilayah Wakatobi memiliki tujuh kantor pos, terdiri dari

dua kantor pos anak perusahaan, Wangi Wangi dan Binonco. Kantor pos sebanyak dua buah di Tomia, Kaledupa dan Wangi-Wangi. Satu pos pendakian terletak di Wangi-Wangi dan satu pos keliling terletak di kawasan Wangi-Wangi.

b. Analisis Aksesibilitas

Maskapai yang saat ini melayani Wakatobi dari Jakarta (melintasi Makassar dan Kendari) adalah Wings Air dengan jadwal penerbangan lima kali seminggu pada pagi hari. Selain itu, tamu yang menggunakan Wakatobi Dive Resort menggunakan pesawat sendiri dan mendarat di landasan pacu di Pulau Tomia. Meski ada dua bandara di Wakatobi, namun hanya satu bandara yang bisa diakses publik, yakni Bandara Matahora. Dimiliki oleh Wakatobi Dive Resort (WDR-Tomia), bandara ini memiliki penggunaan tamu terbatas dan penerbangan langsung dari Bali. Sementara itu, Alat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau tersebut adalah kapal yang merupakan salah satu jenis transportasi laut. Ada dermaga besar dan kecil di pulau utama Wakatobi. Kelemahan dari beberapa jadwal pelayaran antar pulau terutama untuk kapal yang jauh seringkali harus menunggu sampai kapal penuh dengan penumpang sehingga menyebabkan keterlambatan jadwal. Angkutan umum lokal (darat) untuk pulau-pulau utama Kabupaten Wakatobi disediakan oleh layanan ojek, dengan biaya antara Rp 3.000 dan Rp 100.000 tergantung jarak tempuh dan medan yang ditempuh. Apalagi kendaraan roda empat tersedia dengan harga yang sangat bervariasi mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 400.000. Secara umum, jaringan jalan belum mendukung konektivitas antara pusat kota dengan tempat wisata, dan antar tempat wisata. Jaringan jalan yang menghubungkan kota dan kecamatan relatif baik, namun masih banyak potensi objek wisata yang belum sepenuhnya diaspal (data RIPPARDA Kabupaten Wakatobi).

c. Analisis Area Pendukung

Ibu kota Wakatobi, Pulau Wangi Wangi merupakan pulau yang paling maju. Pulau Wangi Wangi memiliki potensi objek wisata berupa pantai, danau, goa dan puncak gunung (dataran tinggi). Pantai yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah di Pulau Wangi-Wangi, Pantai Semara dan Pantai Molly. Selain itu, ada tujuh objek wisata berbenteng yang juga bisa dijadikan wisata sejarah, seperti Mercusuar Waha, Unka Triamba, dan Gua Air. Kegiatan di pulau ini meliputi wisata Bajo dan kano. Acara di Pulau Wangi-Wangi antara lain Festival Liya Keraton dan Festival Wakatobi. Kaledupa merupakan pulau terbesar kedua setelah Wangi Wangi dan menawarkan berbagai kemungkinan wisata baik melalui darat maupun laut. Potensi wisata yang ada terdiri dari pantai, danau, goa dan dataran tinggi. Pantai yang populer bagi wisatawan adalah Pantai Peropa di Desa Peropa dan Pantai Sombano di Desa Sombano. Ada juga gua Dharawa, desa Pajam dan empat benteng. Acara tahunan pulau itu adalah Festival Bharata Kahedupa.

Pulau Tomia sebagian besar berupa padang rumput dengan sedikit hutan. Pulau ini dikelilingi oleh hamparan rumput laut dan ekosistem terumbu karang, dengan daerah pasang surut yang luas. Pantai indah yang sering dikunjungi wisatawan antara lain Pantai Huntete dan Pantai Te Timu. Lalu ada juga empat benteng dan gua air. Tomia juga memiliki pegunungan yang indah untuk dinikmati pemandangannya, seperti Puncak Kahiang dan Puncak Wal Usuk di Tomia Timur. Acara tersebut antara lain Festival Tomia Lilini, Festival Benteng Patua, Festival Kasirapa dan Festival Potapaki. Binongko memiliki beberapa pantai yang menjadi destinasi wisata, antara lain Pantai Palahidu, Pantai Yolo, Pantai Buku, Pantai One Melanka, dan Pantai Wee. Selain pantai, ada Taduna Rock Park. Acara di Pulau Binongko antara lain Festival Silambi, Kalia Wali Ajamani, Festival Slawoka, dan Festival Pandai Besi.

Analisis Sosial Ekonomi

Analisis ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan mangrove dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Berdasarkan data Rencana Pengelolaan Wisata Wakatobi, masyarakat Wangi-Wangi sangat mendukung Rencana Pengembangan Wisata Wangi-Wangi, apalagi jika hal itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat kini menyadari bahwa sumber daya masyarakat yang terbatas merupakan masalah dan memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat. Hutan mangrove di Pulau Kaledupa menjadi penting untuk menopang mata pencaharian masyarakat setempat. Namun kekayaan alam ini seringkali terancam oleh penduduk pesisir. Masyarakat pesisir cenderung mengincar hutan mangrove dalam kegiatan sehari-harinya untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Dikhawatirkan jika hal ini dilakukan secara permanen, hutan mangrove akan punah karena kebutuhan masyarakat setempat meningkat dan semakin banyak informasi dan pengetahuan yang tidak tersedia.

Selain itu, hutan bakau di Pulau Tomia dieksploitasi oleh penduduk setempat dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rumah tangga. Pada dasarnya masyarakat setempat juga memiliki keinginan untuk mengembangkan kawasan wisata tersebut. Pemangku Kepentingan Tomia menginginkan pengembangan pariwisata dilaksanakan di tingkat lokal dengan manfaat yang jelas bagi masyarakat setempat. Mereka mengakui masih kurangnya pemahaman masyarakat lokal tentang pariwisata dan kesulitan dalam mengembangkan potensinya, termasuk keterbatasan dana awal. Komunitas Pulau Binongko sangat mementingkan sektor perikanan laut untuk membawa manfaat ekonomi bagi komunitas Binongko. Masyarakat menyadari besarnya potensi tersebut, namun menghadapi tantangan dalam mengembangkan potensi tersebut karena keterbatasan pemahaman dan keterampilan. Untuk itu, mereka berharap pemerintah daerah dapat membantu mensosialisasikan pariwisata dan membangun infrastruktur terutama jalan.

Analisis Prioritas Optimalisasi Ruang

Tabel 1. Analisis Bobot Variabel Prioritas Pengembangan Potensi Wilayah

No.	Variabel	Bobot			
		Wangi-Wangi	Kaledupa	Tomia	Binongko
1	Jenis Mangrove (bobot x2)	4	8	4	4
2	Indeks Nilai Penting (Bobot x2)	4	6	4	0
3	Fasilitas Penunjang	4	2	3	1
4	Aksesibilitas	4	3	4	3
5	Persepsi Masyarakat (Bobot x2)	4	4	2	2
6	Peran serta masyarakat (Bobot x2)	6	8	4	4
7	Destinasi Wisata Penunjang	4	3	4	3
9	Jumlah	30	34	25	17

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Berdasarkan semua variabel yang dianalisis, prioritas wilayah pengembangan adalah Pulau Kaledupa, diikuti Pulau Wangi-wangi, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Kawasan hutan bakau potensial tersebar di pulau-pulau utama Kabupaten Wakatobi, dan pengembangan hutan bakau harus diprioritaskan.

Optimalisasi Ruang Hutan Mangrove Berbasis Kebijakan Berkelanjutan**1. Rencana Makro**

- a. Menjaga kesinambungan dan kelestarian berupa pemulihan fungsi ekosistem hutan mangrove Wakatobi berupa penghutanan kembali (reboisasi) pada daerah yang telah mengalami kerusakan hutan mangrove khususnya pulau Kaledupa, Wangi-wangi dan Tomia untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem mangrove Wakatobi.
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan restorasi mangrove di Wakatobi (area dan lokasi, jenis penanaman, penanaman dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, teknik restorasi mangrove yang digunakan).
- c. Keterlibatan sosial di kawasan berupa restrukturisasi sistem kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove Wakatobi melalui sinergi antara Pemda Wakatobi, lembaga sosial (seperti WWF dan Balai Taman Nasional), dan masyarakat yang didukungnya membawa manfaat ekonomi dan fungsi ekologis.
- d. Konsep pengembangan makro yang dirumuskan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove Wakatobi meliputi konsep Mina Hutan, konsep pengembangan mangrove berbasis masyarakat, dan konsep pengembangan mangrove berkelanjutan sebagai penguatan konseptual identitas budaya pengembangan mangrove.
- e. Rencana potensi pemanfaatan mangrove untuk membentuk berbagai komunitas lokal yang dihasilkan dari pemanfaatan mangrove.
- f. Rencana kelembagaan untuk integrasi masyarakat, pemerintah dan lembaga pemantauan lingkungan dalam pengelolaan mangrove Wakatobi.

2. Rencana Mikro

- a. Kegiatan yang dilakukan antara lain jalan-jalan di ekosistem hutan mangrove Wakatobi dengan keanekaragaman flora dan faunanya, *birdwatching*, *jogging track* dan *mangrove trail*, serta atraksi wisata air (*boat tour* dan *water sport*). Direncanakan juga sebagai distrik Eduwisata.
- b. Rencana Aksesibilitas Kawasan Wisata Mangrove mempertimbangkan pembentukan sistem transportasi untuk mendukung pelabuhan yang ada. Wisatawan yang tiba dengan perahu dapat melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata.
- c. Sarana penunjang wisata mangrove seperti sarana penginapan dan rumah makan.
- d. Sistem jaringan infrastruktur yang terintegrasi meliputi listrik, air, dan persampahan.
- e. Peran utama masyarakat lokal dalam kerangka kelembagaan wisata mangrove di Kaledupa didukung oleh pemerintah pusat sebagai regulator, pemerintah daerah dan pengawas lingkungan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan data yang telah diolah maka dapat disimpulkan:

1. Ditinjau dari status vegetasi mangrove di pulau-pulau utama Wakatobi, Pulau Kaledupa memiliki *Index of Mangrove Species and Importance* (INP) tertinggi, sedangkan Pulau Binongko terendah.
2. Dari segi akses pelayanan penunjang, Pulau Wangi-Wangi memiliki tarif tertinggi karena merupakan ibu kota Kabupaten Wakatobi. Sementara itu, ketersediaan layanan pendukung di Pulau Binongko sangat minim. Sedangkan dari segi aksesibilitas, Pulau Wangi-wangi dan Pulau Tomia merupakan pulau yang paling mudah dijangkau karena memiliki segala jenis transportasi udara, laut dan darat. Pulau Kaledupa dan Pulau Binongko hanya dapat diakses dengan perahu.

3. Pulau Wangi-wangi dan Kaledupa memiliki skor tertinggi berdasarkan persepsi masyarakat. Hal ini karena penduduk kedua pulau mendukung terwujudnya kawasan wisata terpadu, sumber daya manusia yang memadai, meskipun pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat belum dilakukan secara cerdas akibat eksploitasi yang berlebihan. Sedangkan Pulau Kaledupa memiliki partisipasi terbesar karena memiliki 5 (lima) komunitas, salah satunya adalah komunitas ekowisata.
4. Dari segi ketersediaan destinasi, Pulau Wangi-Wangi memiliki tempat wisata yang paling mendukung dan Pulau Binongko memiliki destinasi yang tersedia paling sedikit selain mangrove.
5. Berdasarkan semua variabel yang telah dianalisis sebelumnya, Pulau Kaledupa merupakan kawasan prioritas pengembangan, diikuti Pulau Wangi-wangi, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko.

Saran

Pulau Wakatobi memiliki sejumlah objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat setempat, salah satunya adalah hutan bakau yang tersebar luas di lima pulau utama. Saran berupa rekomendasi dalam penelitian ini:

1. Rencana optimalisasi ruang hutan mangrove Wakatobi berbasis kebijakan berkelanjutan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan untuk mengembangkan potensi hutan mangrove yang ada bersama masyarakat lokal dan organisasi pemantau lingkungan.
2. Diperlukan indikasi program dan perkiraan biaya serta jangka waktu pengembangan untuk membandingkan sarana teknis untuk menghasilkan hutan bakau yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan.
3. Partisipasi masyarakat setempat sangat diperlukan karena merekalah yang mengetahui segala kondisi terkait hutan mangrove Wakatobi. Keterlibatan masyarakat merupakan simbol tanggung jawab masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amiruddin A. Fisru, Didiharyono. 2018. Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). Jurnal Prosiding Universitas Cokroaminoto Palopo. Palopo.
- Muhammadi, E. Aminullah dan B. Soesilo. 2001. Analisis Sistem Dinamis: Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen. UMJ Press. Jakarta.
- Noor, Yus Rusila dkk., 1999. Panduan Pengenalan Mangrove Di Indonesia. PKA/WI- IP.Bogor.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Nasional.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 – 2032.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.